

Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesejahteraan di Provinsi Jambi

Riskiya Indah Purnamasari Lubis

Fakultas Ekonomi Prodi Pembangunan Universitas Batanghari Jambi

Corresponding email: riskyia2711@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study was to analyze regional financial performance and its influence on the level of public welfare and find out which variable are dominans on the level of publiv welfare. The research method use in this research is quantitative descriptive using secondary data. Types and sources of data used are secondary data collection. The data used in the study were obtained from relevant agencies. The analytical tool used in this study is the analysis of regional financial ratios and multiple linear regression analysis. The data analyzed are the ratio of regional independence and the ratio of effectiveness of PAD and minimum wage data in the last ten years namely 2009-2018. Based on simultaneous testing (Test F) note F count (1.557) is smaller than F table (4.74), this means that simultaneously there is no significant relationship between the independent variables (Independence Ratio and Effectiveness Ratio) to the dependent variable (Minimum Wages). For partial testing (t test) the conclusion is that the calculated value of t is smaller than t table in the variable independence ratio ($-0.554 < 2.3646$) and the Effectiveness ratio variable t value is smaller than t table of ($-0.901 < 2.36346$). The conclusion obtained in testing the analysis of regional financial ratios is the independence Ratio in the medium criteria which is not entirely dependent on the central government and the Effectiveness ratio in the criteria is very effective. While the results of the multiple linear regression analysis test that is the independence ratio and the effectiveness ratio has no effect on the Minimum Wages in Jambi Province.*

Keywords: *Minimum Wages, Independence Ratio, Effectiviness Ratio*

PENDAHULUAN

Pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem sosial keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat apabila pelaksanaan otonomi daerah melakukan kewenangannya dengan baik. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola APBD secara tarnsparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Kinerja pemerintah yang sering dijadikan acuan dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya kinerja keuangan. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah kabupaten dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007:231).

Dalam APBD Provinsi Jambi selama 2009-2018 terlihat bahwa realisasi PAD, target PAD, total penerimaan daerah, pendapatan transfer selalu mengalami peningkatan hanya beberapa tahun saja yang mengalami penurunan. Dari adanya pendapatan yang terdapat di dalam APBD tersebut merupakan salah satu bentuk keterlibatan pemerintah dalam hubungan kesejahteraan masyarakat dalam hal penetapan kebijakan standar upah minimum. Kesejahteraan akan tercapai apabila tingkat upah yang layak, meratanya distribusi pendapatan dan terpenuhinya kebutuhan lain. Dengan hal ini maka analisis kinerja keuangan daerah yang di ukur dengan rasio-rasio keuangannya merupakan informasi yang penting untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Landasan Teori

Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan.

Keuangan Daerah

Menurut Mamesah (Halim 2008: 18-19) dalam Putra (2018:46) keuangan daerah diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasai atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara lebih konkret unsur yang terdapat di dalam APBD dapat dijelaskan pada poin-poin berikut, yaitu :

1. Sumber Pendapatan Daerah

Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari, yaitu :

2. Belanja Daerah

Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, maka belanja terdiri dari atas dua kelompok yaitu belanja langsung yang merupakan urusan pilihan bagi pendanaan kegiatan yang berupa belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, dan belanja tidak langsung yang merupakan urusan wajib bagi setiap daerah yang terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja keuangan dan belanja tidak terduga.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan yang mencakup Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dana hibah dan lain-lain dan pengeluaran pembiayaan yang mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Analisis Rasio Keuangan Daerah

Pengertian analisis rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja dalam suatu periode tertentu.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD dalam Putra (2018:61), yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung rasio bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif, jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut di atas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Medi, 1996 dalam Putra 2018:63).

Kesejahteraan Masyarakat

Dalam mewujudkan tingkat kepuasan yang maksimum agar tercapai kesejahteraan, maka tidak terlepas dari upah. Karena dalam pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat adalah masalah pendapatan pekerja di setiap daerah yakni seperti Upah Minimum. Semakin tinggi upah minimum suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya (Bappeda, 2010).

Hubungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Upah Minimum

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan seberapa besar daerah mampu untuk mandiri dalam membiayai kegiatan pada daerahnya. Dengan kata lain rasio ini dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap sumber daya yang berasal dari eksternal. Kemandirian setiap daerah tentunya berbeda-beda, sesuai dengan sumber daya daerah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan daerah. Semakin tinggi rasio tersebut maka pemerintah daerah semakin berpotensi menyediakan layanan publik yang baik sehingga peningkatan Upah Minimum dapat tercapai.

Dalam penelitian Ida Ayu dan Ida Bagus (2019) kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan rakyat. Ini berarti bahwa kontribusi anggaran pemerintah yang dilihat dari peran pemerintah disini dapat mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari penentuan tingkat upah. Implikasi upah minimum terhadap kesejahteraan akan terwujud dalam perekonomian yang kompetitif (Studi Waisgrais, 2003).

Hubungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Upah Minimum

Pendapatan pemerintah yang tinggi belum tentu menjadi cerminan dapat terwujudnya pembangunan yang baik pada daerahnya. Keberhasilan pembangunan tidak hanya tergantung pada tingginya pendapatan daerah tetapi

pengelolaannya juga menjadi hal penting. Jika pemerintah daerah mengeluarkan program redistribusi pendapatan secara agresif, maka akan menciptakan suatu intensif yang kuat bagi penduduk berpendapatan rendah untuk datang dan mendorong penduduk berpenghasilan tinggi untuk pindah. Program redistribusi pendapatan merupakan pajak bagi penduduk kaya dan sebagai subsidi bagi penduduk miskin (Badrudin, 2012:47). Hal ini akan meningkatkan efektivitas fungsi alokasi oleh pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan masyarakat mampu membayar pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan bagi pemerintah daerah. Penerimaan yang telah dipoleh ini akan digunakan untuk pengeluaran publik dalam memberikan pelayanan dengan baik sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hipotesis

H0: Diduga Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diduga berpengaruh yang terhadap Upah Minimum.

Ha: Diduga Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh yang terhadap Upah Minimum.

METODE

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi atau studi pustaka.

Alat Analisis

Analisis Rasio Keuangan Daerah

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian daerah dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Daerah (%)	Kriteria Kemandirian
0 – 25	Rendah Sekali
25 – 50	Rendah
50 – 75	Sedang
75 – 100	Tinggi

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

2. Rasio efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Efektivitas PAD

Kinerja Keuangan Daerah (%)	Kriteria Efektivitas
>100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri – Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ini untuk melihat kinerja keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kemudian fungsi tersebut dimasukkan ke dalam brntuk model regresi linier berganda pada ekonometrika sebagai berikut (Lains, 2003:) :

$$Y = \text{Log } \beta_0 + \beta_1 \text{Log } X_1 + \beta_2 \text{Log } X_2 + u \text{ atau}$$

$$\text{Log UM} = \text{Log } \beta_0 + \beta_1 \text{Log RK} + \beta_2 \text{Log RE} + u$$

Dimana :

Log UM = Upah Minimum

β_0 = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

Log RK= Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Log RE= Rasio Efektivitas PAD

u = Standar Error

Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel eksogenus secara simultan berpengaruh terhadap variabel endogenus. Langkah-langkah pengujiannya adalah jika $\text{sig} < 0,05$ maka H_a diterima, jika $\text{sig} > 0,05$ maka H_a ditolak.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujiannya menentukan tingkat signifikan (α) yaitu sebesar 5% atau 0,05.

Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi pada intinya menyatakan seberapa baik suatu model untuk menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:87). Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai koefisien determinasi adalah Nilai R^2 harus berkisar sampai 1 ($0 < R^2 < 1$, Bila $R^2 =$ berarti terjadi kecocokan sempurna dari variabel independen menjelaskan variabel dependen, Bila $R^2 = 0$ berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen).

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Untuk mendapatkan regresi yang baik maka data harus bebas dari Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dengan syarat , jika *Nilai Tolerance* $> 0,10$ atau *VIF* < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas (*Jika Nilai Tolerance* besar dari 0,10 atau Nilai *VIF* kecil dari 10 maka tidak terjadi Multikolinearitas) dan jika *Nilai Tolerance* $< 0,10$ atau *VIF* > 10 : terjadi multikolenearitas (*Jika Nilai Tolerance* kecil dari 0,10 atau Nilai *VIF* lebih dari 10 maka terjadi Multikolinearitas).

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya maupun nilai periode sesudahnya. Menurut Sunyoto tidak terjadi Autokorelasi jika nilai *dw* diantara -2 dan +2 atau ($-2 < dw < 2$).

3. Uji Heterokedastisitas

Dasar analisis uji heterokedastisitas adalah terdapat pola tertentu, seperti penyebaran data (titik-titik) membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka di indikasikan terjadi heterokedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan Provinsi Jambi

Untuk mengetahui kinerja keuangan Provinsi Jambi, maka dilakukan analisis rasio keuangan daerah yang meliputi : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas PAD yang dilakukan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi diukur melalui perbandingan antara PAD dengan Dana Transfer yang diterima dari pemerintah pusat dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009-2018

Tahun	Realisasi PAD (dalam rupiah)	TPT (dalam rupiah)	KD (%)	Kriteria KD
2009	526.442.077.650,97	826.020.480.233	63,73	Sedang
2010	686.629.362.314,45	953.131.620.365	72,04	Sedang
2011	984.232.579.912,83	1.093.207.719.996	90,03	Sedang
2012	995.202.289.115,94	1.665.586.782.809	59,75	Sedang
2013	1.063.879.903.502,10	1.814.055.309.316	58,65	Sedang
2014	1.318.523.706.213,24	1.882.425.324.008	70,04	Sedang

2015	1.241.233.028.011,76	1.887.051.548.864	65,78	Sedang
2016	1.233.514.664.109,54	2.159.679.608.454	57,12	Sedang
2017	1.580.533.843.801,00	2.723.260.588.950	58,04	Sedang
2018	1.657.078.000.000,00	2.703.635.858.300	61,29	Sedang
	Rata-Rata		65,65	Sedang

Sumber : BAKAUDA Provinsi Jambi, 2019 (data diolah)

Berdasarkan rasio kemandirian daerah Provinsi Jambi selama tahun 2009-2018 terlihat pada tabel di atas Rasio Kemandirian tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 90,03 persen, dalam kriteria *Sedang* dan rasio kemandirian daerah yang terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 58,04 persen, bahwa kemandirian daerah masih dalam kriteria *Sedang*. Rata-rata rasio tingkat kemandirian daerah Provinsi Jambi adalah sebesar 65,65 persen sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah *Sedang*. Penerapan kebijakan otonomi daerah tidak serta merta menjadikan daerah mandiri dan mampu membiayai segala aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi perolehan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mensejahterakan masyarakat di Provinsi Jambi.

2. Rasio Efektivitas PAD

Pengukuran rasio efektivitas pendapatan Provinsi Jambi selama tahun 2009-2018 diketahui melalui rasio antara realiasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima dengan Target Anggaran. Adapun hasil analisis rasio efektivitas dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Provinsi Jambi Tahun 2009-2018

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	RE	Kriteria Efektivitas
2009	526.442.077.650,97	498.167.990.389,17	105,68	Sangat Efektif
2010	686.629.362.314,45	535.753.443.786,00	128,16	Sangat Efektif
2011	984.232.579.912,83	641.658.215.660,00	153,39	Sangat Efektif
2012	995.202.289.115,94	753.366.207.083,00	132,10	Sangat Efektif
2013	1.063.879.903.502,10	902.554.697.570,26	117,87	Sangat Efektif
2014	1.318.523.706.213,24	1.208.837.984.507,67	109,07	Sangat Efektif
2015	1.241.233.028.011,76	1.253.624.335.381,67	99,01	Sangat Efektif
2016	1.233.514.664.109,54	1.321.876.908.750,82	93,32	Sangat Efektif
2017	1.580.533.843.801,00	1.426.696.725.798,00	110,78	Sangat Efektif
2018	1.657.078.000.000,00	1.494.530.066.299,00	110,88	Sangat Efektif
	Rata-Rata		116,03	Sangat Efektif

Sumber : BAKAUDA Provinsi Jambi (data diolah)

Berdasarkan rasio efektivitas PAD Provinsi Jambi selama tahun 2009-2018 terlihat dari hasil perhitungan realisasi PAD terhadap anggaran PAD dapat dijelaskan pada Tabel 4. Rasio efektivitas PAD yang tertinggi terjadi pada tahun 2011 dimana pemerintah mencapai hampir mendekati setengah dari 200 persen yaitu sebesar 153,39 persen dari anggaran yang ditetapkan. Rasio efektivitas PAD yang terendah pada terjadi pada tahun 2016 dimana pemerintah mampu mencapai 93,32 persen, itupun sudah termasuk kriteria Sangat Efektif karena melebihi dari 100 persen. Dengan Demikian, rata-rata peningkatan PAD sebesar 116,03 persen. Efektivitas dimaksud memberikan arti bahwa penggunaan anggaran publik telah mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik (Uji Klasik Regresi)

Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui apakah terdapat multikolinearitas atau tidak, dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Uji Multikolinearitas
Coefficients

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
LOG_RK	.570	1.755
LOG_RE	.570	1.755

Berdasarkan Tabel di atas Hasil Uji Multikolinearitas di atas dapat diketahui bahwa nilai Tolerance dari Variabel Independen *Rasio Kemandirian (RK)* sebesar 0,570 dan *Rasio Efektivitas (RE)* sebesar 0,570 menunjukkan nilai Tolerance diatas 0,1 dan nilai VIF dari Variabel Independen *Rasio Kemandirian (RK)* sebesar 1,755 dan *Rasio*

Efektivitas (RE) sebesar 1,755 menunjukkan nilai VIF dibawah 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.555	.308	.110	.14721	.630

Pada tabel di atas dapat dilihat nilai DW adalah sebesar 0,630 ini berarti dengan melihat kriteria pengambilan keputusan, maka dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi karena nilai 0,630 berada diantara -2 dan +2 atau ($-2 < 0,630 < 2$).

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengolahan data, uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Dari gambar di atas terlihat bahwa titik-titik sumbu Y tidak membentuk pola tertentu dan titik – titik data menyebar. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas tidak terjadi *heterokedastisitas*.

Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Upah Minimum di Provinsi Jambi Persamaan Regresi Linear Berganda

Hasil uji analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 7. Uji Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	E	Std. Error	Beta		
(Constant)	9.119	1.690		5.396	.001
LOG_RK	-.597	1.078	-.231	-.554	.597
LOG_RE	-.921	1.021	-.375	-.901	.397

Berdasarkan Output regresi tabel di atas model analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Log Y} = \text{Log } \beta + \beta_1 \text{ Log X}_1 + \beta_2 \text{ Log X}_2 + u$$

$$\text{Log UM} = 9,119 - 0,597\text{Log RK} - 0,921 \text{ Log RE} + u$$

Keterangan: Log UM = Upah Minimum
Log RK = Rasio Kemandirian
Log RE = Rasio Efektivitas
u = standar error

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan :

1. Nilai konstanta sebesar 9,119 artinya apabila variabel independen yaitu *Rasio Kemandirian* (X_1) dan *Rasio Efektivitas* (X_2) bernilai nol (0), maka variabel dependen (Y) yaitu Upah Minimum akan bernilai tetap sebesar 9,119.
2. Koefisien regresi variabel *Rasio Kemandirian* (X_1) bernilai negatif sebesar -0.597 artinya apabila variable X_1 *Rasio Kemandirian* mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel Y yaitu Upah Minimum akan mengalami penurunan sebesar 0.597.
3. Koefisien regresi variabel *Rasio Efektivitas* (X_2) bernilai negatif sebesar -0,921 artinya apabila variable X_2 ukuran perusahaan mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel Y yaitu Upah Minimum akan mengalami penurunan sebesar 0,921.

Pengaruh Secara Simultan (F-test)

Hasil pengujian adanya pengaruh antara variabel bebas yaitu Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas terhadap variabel terikat yaitu Upah Minimum di Provinsi Jambi secara simultan dapat dilihat pada Tabeldi bawah ini :

Tabel 8. Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.067	2	.034	1.557	.276 ^b
Residual	.152	7	.022		
Total	.219	9			

Hasil perhitungan menggunakan program spss dengan membandingkan f_{hitung} dengan f_{tabel} dengan taraf signifikan $\alpha = 0.05$. Dapat diketahui bahwa f_{hitung} sebesar 1,557 dengan membandingkan f_{tabel} $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas pembilang (banyaknya X) = 2 dan derajat penyebutnya (N-K-1) = 7, didapat f_{tabel} sebesar 4.74. F_{hitung} lebih kecil dari f_{tabel} ($1,557 < 4,74$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (x) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (y). Yang artinya dapat dikatakan bahwa secara simultan variabel independen *Rasio Kemandirian*, *Rasio Efektivitas* tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Upah Minimum.

Pengaruh Secara Parsial (t-test)

Hasil pengujian dengan SPSS V.22 untuk memprediksi keputusan kinerja keuangan dan pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9.119	1.690		5.396	.001
LOG_RK	-.597	1.078	-.231	-.554	.597
LOG_RE	-.921	1.021	-.375	-.901	.397

Dengan nilai t_{tabel} $\alpha = 0,05$ dan df (N-K-1) = 7, maka diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2.36462 Berdasarkan Tabel diatas hasil pengujian secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel Rasio Kemandirian (RK)

Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu ($0,554 < 2,3646$), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima H_a ditolak artinya secara parsial variabel *Rasio Kemandirian* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Upah Minimum.

2. Variabel Rasio Efektivitas

Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,901 < 2.3646$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak artinya secara parsial variabel tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Upah Minimum.

Koefisien Determinasi (R²)

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat secara bersama-sama apabila R^2 mendekati satu maka garis persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen/terikat adalah hasil perhitungan nilai koefisien determinasi (R^2) dengan perhitungan spss 22.

Tabel 10. Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.555 ^a	.308	.110	.14721

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,308 yang artinya bahwa besarnya kontribusi variabel independen yaitu X1 *Rasio Kemandirian* dan X2 *Rasio*

Efektivitas tidak mempengaruhi variable Y *Upah Minimum* sebesar $(0,308 \times 100 = 30,8\%)$, sedangkan sisanya $(100\% - 30,8\% = 69,2\%)$ dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan daerah ditemukan sebagai berikut :
 - a. Tingkat Kemandirian keuangan daerah berada dalam kriteria sedang, di mana pemerintah Provinsi Jambi sudah mulai mandiri dalam mengelola keuangannya dan hanya sedikit bergantung dengan pemerintah pusat.
 - b. Tingkat efektivitas keuangan daerah di Provinsi Jambi berada dalam kriteria yang sangat efektif.
2. Pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat ditemukan sebagai berikut :
 - a. Kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan arah yang negatif. Hubungan yang negatif berarti bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian, maka belum tentu tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari segi upah minimum di Provinsi Jambi.
 - b. Efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan arah hubungan negatif. Hubungan yang negatif berarti bahwa dengan semakin tinggi tingkat efektivitas, maka belum tentu tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari segi upah minimum di Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvina, Deva, dkk. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Jambi*. Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah. Unja.
- Anonim, 2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Otonomi Daerah*.
- Anonim, 2001, *Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Anonim, 2004, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah*.
- Anonim, 2003, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Kesejahteraan Pekerja/Buruh*.
- Anonim, 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*.
- Ayu dan Bagus. 2019. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan dan Kesejahteraan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali*. Bali: Jurnal Universitas Udayana.
- Azwar dan Achmat Subekan. 2014. *Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan TA 2008-2012)*. Balai Diklat Keuangan Makassar.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. 2010. *Upah Minimum di suatu daerah*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (2019). *Upah Minimum Provinsi*.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermawan, Asep. 2009. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Jhingan, ML. 2013. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mondes, Mohar. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah.
- Muhajirin. 2019. *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kawasan SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012-2017 Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Tesis. Malang: Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim.
- Nurtiyas, Febrika. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putra, Windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Sudirman dan Susilawati. 2018. *Analisis Kinerja Keuangan Provinsi Jambi*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian*. Bamdung: Alfabeta.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah Edisi Pertama*. Yogyakarta: Andi